

RINGKASAN

Dunia menyebut negara berkembang termasuk Indonesia memiliki permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut “*slow back-loaded*”, artinya adalah penyerapan anggaran rendah pada awal tahun hingga pertengahan tahun, tetapi akan melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu indikator pengukuran kinerja organisasi pemerintah dalam mengelola anggaran yang dimiliki. Penyerapan anggaran Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada tahun 2016 yang hanya mencapai target 89,16%. Target tersebut turun sebesar 1,94% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 91,10%. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara parsial pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori Agensi menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) adalah melalui suatu kontrak. Kontrak yang dimaksud adalah masyarakat mempekerjakan pemerintah untuk melaksanakan beberapa tindakan atau kegiatan atas nama masyarakat. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai prinsipal utama sektor publik. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan mengenai kebijakan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, pemerintah diharapkan dapat membuat preferensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kebumen. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 33 OPD. Sampel diambil menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Responden yang diambil untuk mewakili tiap sampel adalah satu pejabat yang berhubungan dengan anggaran atau pengadaan barang/jasa yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, atau Bendahara Pengeluaran. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert empat poin. Analisis data yang digunakan yaitu Uji Kualitas Data, Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Linearitas), Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Goodness of Fit, Uji Koefisien Determinasi (R^2), dan Uji Hipotesis (Uji t).

Hasil dari 3 hipotesis yang diajukan, 2 hipotesis diterima dan 1 hipotesis ditolak. Variabel pengadaan barang/jasa dan sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Kebumen. Sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Kebumen. Hasil pengujian *Adjusted R Square* sebesar 0,506 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menjelaskan penyerapan anggaran sebesar 50,6 %, sedangkan sisanya yaitu 49,4 % dijelaskan oleh variabel lain.

Implikasi penelitian ini adalah OPD dapat menambah pejabat/pelaksana pengadaan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, serta seluruh OPD diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif dan efisien serta berkelanjutan agar seluruh tujuan organisasi terutama penyerapan anggaran baik secara proporsional tiap triwulan maupun penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai sesuai target. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk mengetahui keadaan OPD dalam mengelola sumber daya yang dimiliki melalui pengelolaan APBD. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau peraturan terkait dengan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyerapan anggaran

SUMMARY

The world says developing countries including Indonesia have problems in absorbing a budget called "slow back-loaded", meaning that absorption of the budget is low at the beginning of the year until mid-year, but will soar into the end of the fiscal year. Regulation of the Minister of Finance Number 249/PMK.02/2011 concerning Measurement and Evaluation of Upper Performance Implementation of the State Ministry/Institution's Work and Budget Plan states that budget absorption is one indicator of the performance measurement of government organizations in managing the budget. The budget absorption of Kebumen Regency experienced a decline in 2016 which only reached a target of 89,16%. The target decreased by 1,94% compared to 2015 which reached 91,10%. This study is entitled "The Effect of Budget Planning, Procurement of Goods/Services, and the Government Internal Control System on Budget Absorption of Region Organization (RO) in Kebumen Regency". The study aims to analyze partially the effect of budget planning, procurement of goods/services, and government internal control system on budget absorption of Region Organization in Kebumen Regency.

This study uses agency theory. Agency Theory explains that the relationship between principal (community) and agent (government) is through a contract. The contract in question is that the community employs the government to carry out several actions or activities on behalf of the community. The government as an agent has an obligation to provide community-oriented services as the main principal of the public sector. Therefore, in making decisions regarding policies on allocating expenditure in the budget, the government is expected to make preferences according to the needs of the community.

This type of research is survey research with a quantitative approach. The object of the research is budget planning, procurement of goods/services, government internal control system, and budget absorption at the Region Organization in Kebumen Regency. The population in this study were all Region Organization in Kebumen Regency. Determination of samples using the Slovin formula and obtained as many as 33 Region Organization research samples. Samples were taken using convenience sampling technique. Respondents taken to represent each sample are one official who is related to the budget or procurement of goods/services, namely the Financial Administration Officer, Commitment Making Officer, or Expenditure Treasurer. This study uses 1 dependent variable and 3 independent variables. Data collection techniques used a questionnaire with a four-point Likert scale. Data analysis used are Data Quality Test, Descriptive Statistics, Classic Assumption Test (Normality Test, Heteroscedasticity Test, Multicollinearity Test, and Linearity Test), Multiple Linear Regression Analysis, Goodness of Fit Test, Coefficient of Determination Test (R^2), and Hypothesis Test (t test).

The results of the 3 hypotheses proposed, 2 hypotheses are accepted and 1 hypothesis is rejected. The variable procurement of goods/services and government internal control system partially have a positive and significant effect

on budget absorption of Region Organization in Kebumen Regency. While budget planning has a positive and not significant impact on budget absorption of Region Organization in Kebumen Regency. Adjusted R Square test results of 0,506 indicate that budget planning, procurement of goods/services, and the government internal control system can explain the budget absorption of 50,6%, while the remaining 49,4% is explained by other variables.

The implication of this study is that Region Organization can add procurement officers/implementers by providing education, training, and certification, and all Region Organizations are expected to be able to implement the government internal control system effectively and efficiently so that all organizational objectives, especially budget absorption, are proportional every quarter and budget absorption at the end of the year can be achieved according to target. For the community, this research is expected to provide additional information to find out the condition of Region Organization in managing the resources owned through the management of APBD. For the government, this research is expected to be used as a material consideration in determining policies or regulations related to regional autonomy in regional financial management.

Keywords: budget planning, procurement of goods / services, government internal control system, and budget absorption